PBB dan Perdamaian Dunia

Oleh: Hendra Kurniawan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) lahir pada 24 Oktober 1945, artinya tahun ini PBB tepat berusia 77 tahun. Kelahirannya pasca Perang Dunia II mengusung dasar semangat perdamaian dunia. Setelah tujuh dekade lebih menjadi ibu bagi para bangsa, masih muncul kegelisahan sejauh mana PBB telah menunjukkan pencapaian yang optimal dalam mengupayakan perdamaian dunia?

Kendati Perang Dunia II yang berakhir dengan perang dingin (*cold war*) telah usai, namun PBB masih menghadapi berbagai macam perang dan konflik antarnegara dalam skala regional. Termasuk saat ini yang ada di depan mata, tentu masalah Rusia dan Ukraina.

Dalam dinamikanya menghadapi berbagai macam bentuk perang dan konflik dunia, PBB terus mengalami dilema tarik-menarik kepentingan negara-negara super power. Di sisi lain, harapan tentang perdamaian dunia terus bergulir dari masa ke masa.

Harus disadari bahwa berdirinya PBB diharapkan menjadi mediator yang merefleksikan kepentingan banyak negara. Setiap negara tentu memiliki persoalan dan kepentingannya masing-masing yang tidak ingin diintervensi oleh negara lain.

Kehadiran PBB selama ini diharapkan dapat menjadi penengah dan mediator dengan bersikap netral dalam membantu penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi di banyak negara dan menyangkut kepentingan antarnegara.

Kenyataannya, sorotan kerap ditimpakan pada PBBmengenai netralitas dan keberpihakan PBB pada perdamaian dunia. Seringkali PBB mengalami ketidakberdayaan saat menghadapi dominasi kekuatan negara-negara besar.

Keterikatan terhadap hegemoni negara super power ini menjadi batu sandungan bagi PBB. Organisasi internasional ini dianggap belummampu sepenuhnya bersikap independen dalam menyuarakan nilai-nilai universal.

Dalam menanggapi suatu keprihatikan internasional, kerap desakan negara-negara di luar negara *super power* kerap juga tidak mempan, apalagi dengan adanya hak veto. Bahkan termasuk ketika Sekretaris Jenderal PBB dipegang orang dari Asia maupun Afrika, kekuatan negara-negara barat tetap menjadi perhitungan.

Pada 2015, PBB pernah mengambil keputusan berani terkait status Palestina. Sudah lama konflik Israel-Palestina tak kunjung usai dan mengundang keprihatinan dari banyak negara.

Setelah penantian yang panjang, pemungutan suara di Majelis Umum PBB memutuskan bendera Palestina boleh dikibarkan di kantor pusat PBB. Keputusan ini dapat disebut sebagai suatu kemajuan bagi masa depan Palestina, bagaikan setetes embun di padang pasir. Ke depan, berbagai persoalan yang membelit dalam konflik antara Israel dan Palestina semestinya dapat segera diakhiri.

Pada 2022 ini, di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, terjadi konflik Rusia-Ukraina. Dalam masalah ini sebenarnya PBB juga telah bertindak cepat dan tepat. Pada bulan Maret 2022, PBBmengeluarkan resolusi terkait perang Rusia-Ukraina.

Resolusi mengecam keras aksi Rusia terhadap Ukraina, menuntut agar Rusia segera menarik mundur pasukannya, dan meminta Rusia menghentikan serangannya. Dalam resolusi itu juga ditegaskan, kelak PBB tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang direbut sebagai milik Rusia. Selain itu, PBB juga mengingatkan kembali tentang piagam perdamaian PBB, dampak perang bagi pangan dunia dan masalah penggunaan nuklir.

Seperti kita ketahui bersama, dampak perang seperti yang terjadi pada Rusia dan Ukraina membawa berbagai dampak buruk bagi dunia termasuk berdampak bagi Indonesia itu sendiri. Dampak yang dirasakan juga membawa petaka tersendiri misalnya dari krisis pangan, krisis ekonomi dan keuangan hingga mengarah pada krisis energi. Dampak buruk perang ini juga paling dirasakan oleh negara-negara Eropa yang mempunyai ketergantungan.

Ketergantungan yang dimaksudkan, salah satunya ialah kebutuhan dan ketergantungan energi seperti minyak dan gas bumi dari Rusia. Ketika perang pecah, yang diperburuk dengan berbagai kepentingan misalnya kepentingan ekonomi, dagang bahkan politik menyebabkan negara-negara sulit mendapatkan suplai komoditi tertentu atau energi dari Rusia. Bahkan warga negara di beberapa negara rela menghemat anggaran untuk makan sehari-hari agar bisa membayar tagihan listrik dan tagihan-tagihan lain yang sebelumnya dinaikkan oleh pemerintah atau otoritas setempat.

Lanjutan dari skema perang tersebut tidak hanya terakhir sampai di situ. Efek sebab akibat ini akhirnya akan berujung pada gelombang unjuk rasa dari masyarakat yang memerlukan pertolongan. Di antaranya kebutuhan untuk penurunan harga-harga kebutuhan atau komoditi yang begitu mendesak.

Sebentar lagi 2022 berakhir. Akankah masalah Rusia-Ukraina segera disudahi atau bakal terus berkepanjangan?Ancaman krisis ekonomi dan pangan dunia menanti jika perang tidak segera berakhir.

Galang Perdamaian

Resolusi PBB diharapkan tidak sekadar pernyataan sikap belaka. Dengan dukungan 141 negara terhadap resolusi itu semestinya ada aksi nyata untuk duduk bersama menyelesaikan masalah Rusia-Ukraina.

Tentu tidak mudah, terutama bagi kedua negara yang berkonflik. Masing-masing memiliki kepentingan negara untuk dan harus diperjuangkan. Akan tetapi sebenarnya kepentingan dunia bagi kemanusiaan harus tetap dikedepankan dan diharapkan menjadi landasan dan motif utama untuk tetap menjaga perdamaian di semua wilayah dan di semua benua.

Kuncinya negara-negara yang terkait harus menemukan kesadaran bahwa hidup damai dan berdampingan menjadi penentu masa depan dunia. Indonesia, apalagi dalam kesempatan presidensi G20 di tahun ini, tentu harus menyambut perannya dalam mewujudkan cita-cita ikut mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

Ikut menjaga perdamaian dunia seperti yang termaktub pembukaan undang-undang dasar (UUD) Indonesia itu, maka kita, negara Indonesia harus tegas dalam keberpihakannya. Yakni kepada kemanusiaan dengan membela mereka yang lemah dan tertindas.

Perdamaian jauh lebih utama ketimbang keegoisan dalam membela kepentingan politik maupun ekonomi yang melatarbelakangi perselisihan. Kepentingan kemanusiaan melalui jalan-jalan perdamaian merupakan yang utama dan suatu keniscayaan. Dirgahayu PBB, damailah dunia!***

**Penulis merupakan dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma dan mahasiswa program S-3 (doktoral) pada Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)*